



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdioglu (2016), *The Effect of Corporate Tax Rate on Foreign Direct Investment: A Panel Study for OECD Countries*, Oktober Vol. 16(4), p.599–610.
- Alshamsi, et al (2015), *The impact of inflation and GDP per capita on foreign direct investment: The case of United Arab Emirates*, Investment Management and Financial Innovations. Oktober Vol. 12(3), p.132–141.
- Bowerman, et al (2017), *Business Statistic in Practice*, Edisi 8, New York: McGraw-Hill Education International Edition
- Bunyanin, P., & Wisanggeni, I. (2019), *Current Issue Perpajakan*, Edisi 1, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Caves, R. E. (1971), *International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment*, *Economica*, Februari Vol. 38(149), p.1-27.
- Cleeve, E. (2008), *How Effective Are Fiscal Incentives to Attract FDI to Sub-Saharan Africa?* *The Journal of Developing Areas*, Vol. 42(1), p.135–153.
- Darussalam, et al (2015), *Dilema Tax Holiday*, dalam *Inside Tax Media Tren Perpajakan*, September, Edisi 34, Jakarta: DDTC.
- Devereux, M. P., & Maffini, G. (2006), *The Impact of Taxation on the Location of Capital, Firms and Profit: A Survey of Empirical Evidence*, *European Tax Policy Forum*, April, p.1–52.
- Dunning, J. H., & Lundah, S.M., (2008), *Multinational Enterprises and the Global Economic*, Edisi 2, USA : Edward Elgar Publishing Limited.
- Easson, A. (2004). *Tax Incentive for Foreign Direct Investments*. Netherlands: Kluwer Law International.
- Epaphra, M., & Massawe, J, (2016), *Investment and Economic Growth: An Empirical Analysis for Tanzania*, Preprints.Org, Agustus.
- Etim, R. S., et al (2019), *Attracting Foreign Direct Investment (FDI) In Nigeria through Effective Tax Policy Incentives*. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, Vol. 4(2), 36–44.
- Fahmi, M. R. (2012), Tesis: *Analyzing the Relationship Between Tax Holiday and Foreign Direct Investment in Indonesia*, Graduate School of Asia Pacific Studies Ritsumeikan Asia Pacific University Japan.
- Ghozali, I. (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23*, Edisi 8, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Holland, D., & Vann, R. J. (1998). *Chapter 23, Income Tax Incentives for Investment Income Tax Incentives for Investment*. *Tax Law Design and Drafting*, Vol. 2, p.1–32.
- HS, Salim., Sutrisno, Budi (2017), *Hukum Investasi di Indonesia*, Edisi 2, Depok: Rajawali Pers.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Ismawan, I. (2001). *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Edisi 1, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Jayani, Andi (2013), *Quo Vadis Insentif Pajak di Indonesia*, dalam Inside Tax Media Perpajakan, Juli-Agustus, Edisi 16, Jakarta: DDTTC.

Kassahun, S. (2015), Tesis: *The impacts of tax incentives in attracting foreign direct investment in Ethiopia*. Addis Ababa University.

Kehal, H. S(ed.) (2004), *Foreign Investment in Developing Countries*, Edisi 1, Newyork: Palgrave Macmillan.

Klemm, A., Van Parys, S., (2011), *Empirical evidence on the effects of tax incentives*, International Tax Public Finance, September Vol. 19, p.393-423.

Malepati, V., Gowri, C. Mangala,(ed.) (2018), *Foreign Direct Investments (FDIs) and Opportunities for Developing Economies in the World Market*, USA: IGI Global.

Moosa, A. I. (2002), *Foreign Direct Investment : Theory. Evidence and Practice*, Edisi 1, Newyork: Palgrave Macmillan.

Mulyodiwarno, Nuryadi (2018), *Reformasi: Menuju Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Perpajakan*, Edisi 1, Depok : PT RajaGrafindo Persada.

OECD (2007), *OECD Tax Policy Studies Fundamental Reform of Corporate Income Tax*, No. 16 USA: OECD Publishing.

OECD (2008), *OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment*, Edisi 4, USA: OECD Publishing.

OECD (2019), *Corporate Tax Statistics*, Edisi 1, USA: OECD Publishing.

Pinto, C. (2002), Tesis: *Tax Competition and EU Law*, Amsterdam Center of International Law.

Republik Indonesia. 1967. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967, No. 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1970. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Penanaman Modal Asing*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970, No. 46. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1983. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 3263*.

Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Dubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 3567.

Republik Indonesia. 1996. *Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996. Sekretariat Negara. Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah No. 148 Tahun 2000. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, No 4066. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 3985.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, No. 67. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, No. 133.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 150. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 1994. *Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, No. 161. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 503. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan..* Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1470. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1218. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 967. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 451. Sekretariat Negara. Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1553. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 715. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nomor 5 tahun 2019 mengenai Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 821. Sekretariat Negara: Jakarta.

Saidi, Ali S. (2015), *Corporate Taxation and Foreign Direct Investment*, European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, Agustus Vol. 3(8), p. 17-24.

Salvatore, D. (2013), *International Economics* Edisi 11, USA: John Willey & Sons, Inc.

Shome, P(ed.) (1995), *Tax Policy Handbook*, Tax Policy Divison & Fiscal Affairs Department & International Monetary Fund, Washington D.C.

Simanjuntak, T. H. (2019), *Perpajakan Internasional*, Edisi 1, Yogyakarta: ANDI.

Sonarjah, M. (2010). *The International Law on Foreign Investmet*, Edisi 3, Newyork: Cambridge University Press.

Steichen, A. (2002), *'Tax competition in europe or the taming of leviathan'*, General Report at the EALTP Seminar in Lausanne; 2002, pp 111, Luxembourg, 12 Januari 2020.

Sugiyono (2003). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan Ke-26, Bandung: Alfabeta.

Tax Foundation (2019), *Corporate Tax Around the World*, diakses tanggal 28 Januari 2020.

UNCTAD (2000), *Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey*, No. 16, Newyork and Geneva: United Nations Publication.

UNCTAD (2012), *World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development*, Switzerland: United Nations Publication.

Van Parys, S., & James, S. (2010), *The effectiveness of tax incentives in attracting investment: Panel data evidence from the CFA Franc zone*, International Tax and Public Finance, 17(4), 400–429.

Waluyo (2017), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat.

World Bank (2019), *World Development Indicator*, di akses 28 Januari 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.